

# Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia

Aan Budianto<sup>1</sup> 

Uswatun Hasanah<sup>2</sup>

Muhammad Bisri Mustofa<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> UIN Raden Intan Lampung

 [aanbudianto@radenintan.ac.id](mailto:aanbudianto@radenintan.ac.id)

Article history:

Submitted:

Accepted:

Published:

**Abstract:** This study aims to explore the background of the implementation of local transmigration policies in Lampung. Lampung area that has been since the colonial era has become a destination for population displacement called colonization, continues to experience an increase in the number of residents until the beginning of the independence period. The existence of a self-initiated transmigration policy caused Lampung to experience a surge in the population. The result of the analysis of this study is that the impact of population transfer to Lampung until the 1950s is getting out of control. Seen from the increasing number of forests cut down by the migrants. Another problem arises with the gathering of the community from Java. Many areas in Lampung later like to become a Colony of Java, such as Gading Rejo, Pringsewu, Kalirejo and Metro. On the other hand, the northern part of Lampung is not touched once. The unrest of the natives *ulun* Lampung was also contained in the customary congress in Palembang who wanted to organize Lampung with a local migration program. Starting from the 1970s, Lampung Transmigrasi began to display results in the 1990s where the northern Lampung region began to show development. In central and southern Lampung which was dominated by agriculture, in northern Lampung began to grow community plantations. Besides, other businesses such as trade and transportation were more stretched in Lampung in the 1990s.

**Keyword:** *Local Transmigration, Lampung, Resettlement.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang diterapkannya kebijakan transmigrasi lokal di Lampung. Wilayah Lampung yang sudah sejak era kolonial sudah menjadi tempat tujuan pemindahan penduduk (kolonisasi), terus mengalami penambahan jumlah penduduk hingga di awal masa kemerdekaan. Kebijakan transmigrasi swakarsa di era kemerdekaan turut membuat Lampung mengalami lonjakan jumlah penduduk. Hasil analisis dari kajian ini adalah bahwa dampak pemindahan penduduk ke Lampung hingga tahun 1950-an semakin tidak terkendali. Terlihat dari semakin banyaknya hutan yang ditebang oleh para pendatang. Masalah lain muncul dengan berkumpulnya komunitas masyarakat dari Jawa. Banyak daerah-daerah di Lampung kemudian seperti menjadi sebuah koloni Jawa, seperti Gading Rejo, Pringsewu, Kalirejo dan Metro. Disisi lain, daerah Lampung bagian utara tidak terjamah sekali. Keresahan warga asli *ulun* Lampung pun sempat tertuang dalam kongres adat di Palembang yang menginginkan ditatanya Lampung dengan program tran migrasi lokal. Dimulai sejak tahun 1970-an, Transmigrasi Lampung mulai menampakkan hasil pada tahun 1990-an dimana di wilayah Lampung bagian utara mulai menampakkan perkembangan. Di Lampung bagian tengah dan selatan yang tadinya didominasi dengan pertanian, di Lampung bagian utara mulai

## Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia

Aan Budianto, Uswatun Hasanah, Muhammad Bisri Mustofa

tumbuh perkebunan masyarakat. Selain itu, usaha-usaha lain seperti perdagangan dan transportasi lebih menggeliat di Lampung pada tahun 1990-an.

**Kata Kunci:** *Transmigrasi Lokal, Lampung, Resettlement.*

### PENGANTAR

Kepadatan penduduk di Lampung pasca kemerdekaan mengalami lonjakan yang cukup pesat. Program transmigrasi yang melanjutkan program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda membuat daerah Lampung menjadi primadona tujuan orang-orang dari Jawa. Tawaran lahan seluas kurang lebih 2 hektar per keluarga dan harapan kehidupan yang lebih layak membuat orang-orang mengikuti program transmigrasi ke Lampung, baik dengan sponsor pemerintah maupun dengan modal sendiri (swakarsa).

Sejak diterapkannya program kolonisasi tahun 1905 oleh pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, jumlah penduduk di wilayah Lampung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1905, kepadatan penduduk di Lampung hanya sebesar 5 jiwa per kilometer persegi,<sup>1</sup> namun pada tahun 1930-an kepadatan di Lampung naik menjadi sebesar 12 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Bahkan pada tahun 1950-an, terdapat lebih dari 83 ribu keluarga Jawa telah berhasil dipindahkan ke Lampung.<sup>3</sup> Menurut perkiraan Tan Goang Tiang dalam brosurinya berjudul “Arti dan Tujuan Demografi” yang dikutip oleh H.J Hereen, disebutkan bahwa di tahun 1940 dan 1950 jumlah masyarakat bersuku Lampung sebanyak 673.300 dan masyarakat bersuku Jawa sebanyak 400.000.<sup>4</sup> Jumlah pendatang terus bertambah secara signifikan pasca diterapkannya program perpindahan penduduk dari pemerintah Indonesia melalui program transmigrasi, terutama karena arus perpindahan secara swakarsa yang cukup besar dari Jawa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Jumlah penduduk di Lampung pada waktu itu berjumlah 156.618 jiwa. Terdiri dari 155.080 bumi putra, 146 orang eropa, 486 orang china, 108 orang arab dan timur asing. (sumber: lihat buku *Sejarah Daerah Lampung*, yang dikeluarkan oleh Depdikbud Lampung 1997/1998. hlm 77).

<sup>2</sup> Departement Van Economische Zaken, *volkstelling 1930: Deel IV Inheemsche Bevolking van Sumatra (Census of 1930 in then Netherlands Indies: Volume IV Native Population in Sumatra*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1935). Periksa juga Patrice Lewang, H. J. Heereen, *Transmigrasi di Indonesia* (Jakarta; Gramedia, 1979), hlm. 131.

<sup>3</sup> ORSTROM dan Departemen Tranmigrasi, “Transmigration and Spontaneous, Provinsi Lampung” dalam Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia 2: Batas-batas Rekayasa Sosial* (Jakarta: Lipi Press, 2010), hlm. 294.

<sup>4</sup> H. J. Hereen, *Transmigrasi di Indonesia ...* Hlm 42.

<sup>5</sup> Sukamto, *Masalah Penyediaan Lokasi Tranmigrasi dalam Rangka Pembangunan Daerah di Lampung*, (Jakarta: Program Perencanaan Nasional. F.E.U.I-BAPPENAS, 1973), hlm. 5. Bahkan di tahun 1961 jumlah penduduk asli Lampung hanya sebesar 554.848 jiwa, sedangkan pendatang sudah menyentuh angka 1.114.152 jiwa. Pada tahun 1971, penduduk asli Lampung hanya sebesar 680.125 sedangkan pendatang sudah dua kali lipat dari tahun 1961, yaitu berjumlah 2.096.960 jiwa.

Penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan sempat membuat khawatir masyarakat asli suku Lampung yang mulai terancam hak-hak dan kepentingan adatnya. Tokoh-tokoh adat Lampung menginginkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kepentingan pendatang, tapi juga pada masyarakat lokal yang menjadi tempat tujuan program pemindahan penduduk. Selama ini pemerintah

Terkesan hanya sibuk pada permasalahan pendatang dengan memberi fasilitas dan berbagai subsidi. Terlebih lagi banyaknya pendatang dianggap oleh tokoh adat Lampung menimbulkan permasalahan besar yaitu semakin luasnya hutan dan tanah adat yang dibuka oleh para pendatang yang berakibat pada masalah lingkungan. Umumnya, pembukaan hutan yang tidak terkontrol oleh pemerintah adalah yang dilakukan oleh pendatang swakarsa. Contoh tidak terkendalinya pembukaan hutan adalah pemukiman migran di sebelah utara sungai Way Sekampung yang saat ini bernama daerah Sukoharjo dan Kalirejo yang didatangi oleh para transmigran swakarsa dari Jawa sejak 1955.<sup>6</sup>

Kekhawatiran masyarakat Lampung akan mulai terusiknya eksistensi mereka kemudian tertuang ke dalam sebuah Kongres Adat yang dilaksanakan pada Januari 1956 di Palembang yang berlanjut pada Maret 1957 di Bukit Tinggi. Kongres tersebut menghasilkan tuntutan dan teks resolusi untuk menghentikan program pemindahan penduduk ke Lampung. Salah satu dalam tuntutan tersebut adalah menginginkan adanya penataan upaya kebijakan yang mengakomodasi kepentingan penduduk asli suku Lampung yaitu dengan program transmigrasi lokal. Berikut ini cuplikan teks resolusi Kongres Bukit Tinggi yang dimuat di surat kabar *Indonesia Raya* edisi 20 Maret 1957 berbunyi sebagai berikut:

... Daerah-daerah transmigrasi yang belum digunakan atau belum dibuka oleh transmigran baru, harus dicadangkan bagi penduduk asli yang pindah sebagai transmigran lokal. Kecuali dari sekarang ini harus dimulai *transmigrasi lokal* disamping transmigrasi umum dan angggaran dasarnya perlu ditentukan. Garis-garis kebijakan sekarang tentang transmigrasi perlu ditinjau kembali dan didasarkan atas gagasan atas pendapat daerah-daerah diuar Jawa dimana dilaksanakan transmigrasi itu. Pengiriman transmigran dari Jawa ke daerah-daerah luar jawa harus terlebih dahulu dirundingkan dengan daerah-daerah itu dan selanjutnya harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan adat daerah yang bersangkutan sedangkan persyaratannya harus ditentukan oleh daerah bersangkutan sendiri ...<sup>7</sup>

Teks resolusi ini menjadi tonggak awal wacana transmigrasi lokal di Lampung yang kemudian dilakukan pada tahun 1970-an. Tujuannya selain untuk menghindari adanya benturan kepentingan antar suku, juga untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi di Lampung.

---

<sup>6</sup> Kampto Utomo, *Masyarakat Tranmigran Spontan di Daerah Wai Sekampung (Lampung)*, (Yogyakarta: UGM Press, 1975).

<sup>7</sup> *Indonesia Raya*, Edisi 20 Maret 1957, hlm 1. Hasil kongres ini juga bisa dilihat pada H.J Heeren, *Transmigrasi di Indonesia*, hlm. 49-50, dan juga Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia 2 ...*, hlm 300.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan metode penelitian sejarah yang dimulai dengan pengumpulan sumber yang memuat informasi berkaitan dengan program transmigrasi lokal atau *resettlement* di Lampung. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Surat Keputusan terkait pengiriman transmigrasi, foto-foto sezaman, koran atau media massa, dan data statistik penduduk Lampung. Sumber-sumber tersebut diperoleh di Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta (ANRI), Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung. Data-data yang didapat setelah diverifikasi kemudian diinterpretasikan sesuai kepentingan penelitian yaitu melihat perspektif latar belakang dan tujuan program transmigrasi lokal di Lampung. Setelah itu didapatkan hasil analisis tentang bagaimana proyek transmigrasi lokal di Lampung berjalan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang Transmigrasi Lokal di Lampung**

Sejak adanya protes dari warga masyarakat asli Lampung pada tahun 1956, pemerintah mulai memikirkan penataan wilayah transmigrasi di Lampung. Karena selain kedatangan transmigran dari Jawa, pada tahun tersebut juga Lampung menerima transmigran dari daerah lain seperti Bali. Komposisi yang semakin heterogen ini membuat penataan sedikit rumit karena menambah variable baru yaitu latar belakang budaya.

Program *Resettlement* atau transmigrasi lokal menurut laporan Djawatan Transmigrasi selain untuk mengatur komposisi masyarakat, juga bertujuan untuk memberi kesempatan pada penduduk asli untuk turut mengenyam bantuan kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan.<sup>8</sup> Program yang tadinya fokus membantu para transmigran, kemudian memperhatikan juga kepentingan masyarakat asli Lampung. Dengan disebarnya para transmigran ke daerah yang masih kecil kepadatan penduduknya, ruang gerak penduduk asli Lampung menjadi tidak terganggu.

Wilayah Lampung bagian tengah yang mempunyai kontur tanah datar dan subur memang menjadi daerah favorit tujuan para pendatang dibandingkan wilayah Lampung lainnya.<sup>9</sup> Contohnya

---

<sup>8</sup> Djawatan Transmigrasi, *Transmigrasi 1951-1955*. Djakarta: Djawatan Transmigrasi Pusat, 1955. hlm. 5.

<sup>9</sup> "Masih 29 Desa Berada di Hutan Lindung" *Lampung Post* Edisi 19 November 1993, hlm 4. Para pendatang lebih memilih Lampung Tengah karena kontur tanahnya yang cukup datar dan subur. Mereka nekad membuka hutan meskipun tahu itu adalah hutan lindung.

seperti kedatangan transmigran swakarsa dari Bali dari Desa Tangkas (Klungkung) yang tiba pada tahun 1963. Transmigran ini menyerbu daerah Gunung Balak di Lampung Tengah yang sebenarnya daerah ini tidak boleh dihuni karena merupakan daerah hutan lindung. Karena menempati daerah yang termasuk kawasan hutan lindung, maka pada tahun 1971 mereka dipaksa oleh pemerintah daerah Lampung untuk pindah ke Lampung Utara. Rumah-rumah mereka telah dirobohkan. Namun karena pada tahun tersebut belum ada program *resettlement* atau transmigrasi lokal (translok) serta lahan untuk memindahkan transmigran belum ada, maka pemindahan mereka urung dilakukan.<sup>10</sup> Transmigran di Gunung Balak kemudian beberapa diantaranya pindah ke Way Abung III dan Banjit di Way Kanan yang telah sejak 1963 menjadi daerah “transmigrasi sisipan” untuk menampung korban bencana Gunung Agung.<sup>11</sup>

Seperti pertimbangan untuk menempatkan orang Jawa di Metro dan sekitarnya, menurut Patrice Levang bahwa karakter wilayah di bagian tengah dan timur Provinsi Lampung hingga ke arah selatan merupakan daerah subur karena merupakan endapan sungai dan endapan vulkanis. Ciri tersebut merupakan karakteristik yang cocok untuk lahan persawahan.<sup>12</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah demografi (pola permukiman) sedikit banyak terpengaruh oleh ekologi. Selain itu daerah Lampung di bagian tengah dan timur merupakan daerah yang dekat dengan muara sungai-sungai besar di Lampung yang bersumber dari *Way* Sekampung, Sungai Tulang Bawang, Sungai Pegadungan dan *Way* Seputih, yang kesemuanya berasal dari Bukit Barisan dan berakhir di laut Jawa.<sup>13</sup> Wilayah-wilayah di bagian tengah, timur dan sebagian selatan di Lampung ini memang menjadi destinasi yang paling cocok dengan karakter para transmigran sehingga membuat penumpukan jumlah transmigran di daerah-daerah ini.

Perkembangan penduduk di Lampung bagian tengah dan selatan (Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan) terus tumbuh dan menyisakan sedikit saja lahan untuk pemukiman

---

<sup>10</sup> “Transmigran Bali di Lampung: Membawa dan Mengembangkan Tradisi Asal”, *Kompas*, Edisi 11 Januari 1982, Hlm. 8. Made Sekar yang berasal dari Desa Tangkas, kabupaten Klungkung, Bali datang ke Lampung secara swakarsa pada tahun 1963 pasca meletusnya gunung Agung.

<sup>11</sup> Palali Wamid dan Teguh W.S., *Laporan Proyek Transmigrasi ...*, hlm.80 dan 83. Orang Bali yang ditempatkan di Banjit berjumlah 1.084 KK atau 4.917 jiwa dari keseluruhan korban Gunung Agung yang dipindahkan ke Lampung sejumlah 3.822 KK atau 15.716 jiwa.

<sup>12</sup> Patrice Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia* (Jakarta: KPG, 2003), hlm. 131.

<sup>13</sup> Sukamto, *Masalah Penyediaan Lokasi Transmigrasi dalam Rangka Pembangunan Daerah di Lampung*, (Jakarta: Program Perencanaan Nasional. F.E.U.I-BAPPENAS, 1973), hlm. 13.

## Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia

Aan Budianto, Uswatun Hasanah, Muhammad Bisri Mustofa

baru.<sup>14</sup> Alhasil, menjelang akhir tahun 1970-an hutan di Lampung hanya tinggal tersisa 17%, dimana dari batas minimal cadangan hutan yang dicanangkan seluas 30%.<sup>15</sup>

Di sisi lain, wilayah Lampung di bagian utara (Lampung Utara, Waykanan dan Tulang Bawang) masih sangat luas dan relatif “kosong” dimana kepadatan di Lampung bagian utara hanya sebesar 31 jiwa/km<sup>2</sup>, jauh dengan di Lampung Tengah yang mencapai sebesar 132 jiwa/km<sup>2</sup> dan Lampung Selatan yang sebesar 191 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>16</sup> Kondisi tersebut yang melandasi diadakannya *resettlement* (pemindahan penduduk dalam skala lokal) tahun 1978 di Lampung agar persebaran komposisi penduduk di Lampung lebih merata.<sup>17</sup>

Wilayah-wilayah yang menjadi asal penduduk yang dipindahkan melalui transmigrasi lokal (*resettlement*) di Lampung pada tahun 1978/1979 memiliki kepadatan yang tinggi. Seperti yang tercatat dalam publikasi “Lampung dalam Angka tahun 1977”, Daerah (Kecamatan) Pringsewu pada tahun 1977 dengan kepadatan penduduk mencapai 765 jiwa/km<sup>2</sup>, Gading Rejo dengan kepadatan penduduk 908 jiwa/km<sup>2</sup>, Sukaharjo dengan kepadatan penduduk 645 jiwa/km<sup>2</sup>, Kalirejo dengan kepadatan penduduk 653 jiwa/km<sup>2</sup>, Seputih Raman dengan kepadatan penduduk 315 jiwa/km<sup>2</sup>, Seputih Banyak dengan kepadatan penduduk 232 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Seputih Mataram dengan kepadatan penduduk 230 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun daerah Lampung bagian utara yang menjadi daerah tujuan transmigrasi lokal di Lampung seperti Pakuan Ratu di Way Kanan, hanya memiliki kepadatan penduduk 12 jiwa/km<sup>2</sup>, Banjit dengan kepadatan penduduk 48 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Mesuji dengan kepadatan penduduk 3 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Periksa “Lampung: Ekonomi sebuah Koloni Menyongsong Otonomi Daerah” dalam Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 10. Faktor lain diadakannya *resettlement* yaitu karena sejak Repelita II (1974-1979), Pemerintah Daerah Lampung mulai mengundang banyak investor agribisnis seperti jagung, nenas, tebu, dan tambak udang yang sebagian terpusat di Lampung Tengah. Sehingga, selain bertujuan meratakan penduduk kearah Lampung bagian utara, *resettlement* juga bertujuan memberi tempat bagi pengembangan perusahaan agribisnis tersebut.

<sup>15</sup> “Kampung disekitar transmigrasi akan dipugar” *Kompas* Edisi 5 November 1986 hlm 3.

<sup>16</sup> “Laporan Pra Survey dari Tim ITB; Mengenai Penerapan Alat-alat Pertanian Semi Mekanis guna Menunjang Pembinaan Daerah-daerah Transmigrasi di Indonesia”, hasil kerjasama Direktorat Jendral Transmigrasi dengan Fakultas Mekanis dan Teknologi Hasil Pertanian ITB tahun 1976, hlm LG-2.

<sup>17</sup> “Pola Pembinaan Pemukiman di Desa Transmigrasi”, *Kompas* Edisi 9 Februari 1980, hlm. 6. Lihat juga Laporan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dalam Muhajir Utomo dkk, *90 tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*, (Jakarta: Puspaswara dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, 1997), hlm 281. Dengan diadakannya *resettlement* yang dimulai tahun 1978, wilayah Lampung dinyatakan tertutup untuk pendatang. Program ini dilakukan untuk menertibkan para perambah hutan lindung yang tidak terkendali dan menata persebaran pendatang di Lampung.

<sup>18</sup> Publikasi No. 27/LPG dari Bappeda dan Kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung, *Lampung dalam Angka 1977*, diterbitkan pada September 1978.

Program pemindahan penduduk atau *resettlement* di Lampung yang diterapkan pada awal Pelita III (1979/1980) mempengaruhi persebaran transmigran swakarsa di Lampung. Mereka yang tidak memiliki tanah seperti di Lampung Tengah dan hanya mengandalkan bekerja di tempat saudaranya tertarik untuk membuka lahan di wilayah Lampung bagian utara. Daerah yang dipersiapkan untuk *resettlement* di Lampung Utara diantaranya adalah Banjit, Pakuan Ratu, Tulang Bawang dan Mesuji.

## B. Perubahan Cara Bertani

Selain terjadinya perubahan tempat tinggal, program transmigrasi lokal juga merubah gaya Bertani para penduduk transmigran. Perubahan pola bertani dari persawahaan menjadi pertanian kebun yang dilakukan oleh peserta *resettlement* dipengaruhi oleh kondisi lahan. Para peserta transmigran lokal ke Lampung Utara dihadapkan pada jenis tanah yang cukup berbeda dengan di Lampung Tengah. Kontur tanah di Lampung Utara lebih bergelombang dan lebih kering (lahan marginal) dibandingkan dengan wilayah Lampung bagian tengah dan selatan. Jenis lahan di Lampung Utara secara umum didominasi *ultisol* dan *oksisol* (*podsolik* merah kuning), bereaksi masam dan unsur hara rendah. Sehingga jika ingin diolah sebagai lahan persawahan akan sangat membutuhkan pengapuran, pemupukan dan pengelolaan yang intensif agar tanah menjadi produktif.<sup>19</sup>

Di Lampung bagian utara, program transmigrasi lokal atau *resettlement* tahun 1978 turut membantu meningkatkan perekonomian para peserta transmigrasi lokal. Dinas Ketransmigrasian bekerjasama dengan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) X memberi bantuan tanaman karet kepada peserta *resettlement* sebagai subsidi. Sekitar 30 keluarga transmigran dari Seputih Rahman yang ditempatkan di Desa Makarti dan Tirta Kencana, Way Abung II Lampung Utara, berdasarkan laporan program kerja PNP X, diberi bantuan tanaman karet seluas dua hektar. PNP X bertanggung jawab memberi pengarahan atas penanaman pohon karet sampai berumur 3 tahun. Setelah umur tersebut, tanaman pohon karet akan dibagi-bagikan kepada penduduk di mana tiap keluarga akan memperoleh 0,5

---

<sup>19</sup> Benyamin G Widyatmoko dan M. Irfan Affandi, “Transformasi Struktural di Wilayah Permukiman Transmigrasi Lahan Kering Terhadap Perekonomian Propinsi Lampung”, dalam Muhajir Utomo dkk, *90 tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*, (Jakarta: Puspaswara dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, 1997), hlm 241.

## Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia

Aan Budianto, Uswatun Hasanah, Muhammad Bisri Mustofa

hektar sebagai hak milik penuh dengan ketentuan para transmigran akan memasarkan hasil karetnya kepada PNP X sesuai harga pasar.<sup>20</sup>

Transmigran di beberapa wilayah di Lampung Utara seperti Banjit, Pakuan Ratu dan Tulang Bawang juga memilih menanam singkong dan jagung. Pilihan menanam singkong dan jagung bagi mereka yang tidak menjalin kerjasama dengan PNP karena alasan menunggu hasil tanaman karet atau sawit yang lama. Tanaman singkong dapat dipanen hanya dalam waktu kurang lebih tujuh bulan, sedangkan jagung dapat dipanen kurang lebih setelah seratus hari tanam. Penghasilan dari satu hektar lahan yang ditanam singkong pada tahun 1980-an berkisar 40 hingga 50 ton. Sedangkan jagung dalam satu hektar dapat menghasilkan enam hingga sepuluh ton. Penghasilan tersebut lebih dari cukup bagi para transmigran lokal untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>21</sup>

Program transmigrasi lokal atau *resettlement* yang diterapkan sejak 1978 juga membuka peluang usaha baru dalam bidang transportasi. Keadaan terpisah dengan sanak saudara yang masih berada di Lampung Tengah dan Lampung Selatan terkadang menimbulkan rasa ingin bertemu dan menyambung tali persaudaran. Keinginan untuk bertegur sapa dengan sanak saudara ini lah yang memunculkan kebutuhan akan transportasi muncul di daerah-daerah *resettlement*. Penduduk di kecamatan-kecamatan yang menjadi tujuan transmigrasi lokal seperti Banjit, Pakuan Ratu, Mesuji, Tulang Bawang atau wilayah lain di bagian utara Lampung biasanya menyebut tempat tinggal sebelum mengikuti program *resettlement* sebagai *kampung*.

Usaha dibidang transportasi pertama kali dirintis oleh oleh I Ketut Narya, seorang warga Bali di Banjit yang berprofesi sebagai pedagang sembako keliling. Saat berjualan, Ia kerap mendengar curhatan dari para pelanggannya yang berharap adanya sarana transportasi dengan tujuan Lampung Tengah atau Lampung Selatan. Melihat permintaan akan adanya suatu jenis jasa transportasi yang semakin lama semakin besar, Ia kemudian berinisiatif untuk membeli sebuah Bus bermuatan penumpang sekitar 30 orang untuk melayani orang-orang di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.

Program transmigran lokal di Lampung pada akhirnya membuat perekonomian lebih bergairah. Peta kependudukan yang lebih tertata membuat perebutan lahan bisa dihindari. Program transmigrasi

---

<sup>20</sup> Suharso dkk, *Transmigran: Ciri, Proses, dan Aspirasinya: Sebuah Studi Kasus di Way Abung Lampung Utara*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1982), hlm. 27. Selama menunggu hasil tanaman karet, orang Bali juga membuka lahan dan menanam singkong dan jagung. Namun lahan yang dibuka tidak menjadi hak milik mereka. Mereka hanya diberi wewenang menggarapnya saja.

<sup>21</sup> Wawancara dengan I Komang Ardika di SP 2 Pakuan Ratu, Way Kanan 2015 pada 6 Juni 2015. Ia menjadi peserta program transmigrasi lokal tahun 1980 dari Lampung Tengah.



lokal juga mengakomodasi kepentingan para penduduk asli suku Lampung dimana hak-hak adat dan kekuasaan atas tanah masih dihormati dan tidak terganggu dengan adanya para pendatang.

## SIMPULAN

Tidak ada kebijakan yang tidak berdampak, terutama jika berkaitan dengan kebijakan pemindahan penduduk. Benturan kepentingan kerap terjadi antara penduduk asli dan pendatang. Terlebih seperti di Lampung yang sudah puluhan tahun menjadi daerah tujuan pemindahan penduduk. Kondisi ini membuat masyarakat Lampung yang sebelumnya terbuka terhadap pendatang, mulai merasa terganggu dengan tidak terkendalinya jumlah transmigran yang masuk ke Lampung.

Transmigrasi lokal menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah benturan sosial akibat program transmigrasi di Indonesia. Program ini terbukti mengurangi potensi gesekan sosial akibat semakin heterogennya komposisi masyarakat di Lampung. Perpindahan secara lokal juga mampu mendorong kreatifitas para transmigran untuk beradaptasi dengan jenis tanah baru. Terlihat dari perubahan gaya Bertani dari wilayah Lampung bagian tengah ke bagian utara. Bahkan usaha transportasi di Lampung yang dimotori oleh masyarakat Bali muncul berkat adanya program transmigrasi lokal. Pasar-pasar sebagai penggerak ekonomi daerah juga mulai tumbuh akibat adanya program ini, seperti terlihat di Banjir dan Unit Dua. Dengan kemajuan ekonomi yang dialami secara bersama di Lampung, hal ini berarti juga bahwa program ini secara tidak langsung telah mengintegrasikan masyarakat Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, Sri dan Mujiraharjo, Djoko. 1996. *Perubahan Lingkungan di Daerah Transmigrasi di Sumatera Selatan*. Jakarta: Bupara Nugraha.
- Hadikusuma, Wilman. (1989): *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju.
- Heeren, H.J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia : Hubungan Transmigran dan Penduduk Asli, dengan Titik Berat Sumatera Selatan dan Tengah*. Jakarta: Gramedia.
- Indonesia Raya* Edisi 20 Maret 1957. "Konggres Adat Se-Sumatera: Stop Transmigrasi ke Sumatera, Laksanakan Transmigrasi Lokal", hlm 1.

## **Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia**

Aan Budianto, Uswatun Hasanah, Muhammad Bisri Mustofa

- Kusworo, Ahmad. 2004. *Pursuing livelihoods, imagining development: smallholders in Highland Lampung, Indonesia*. Australian National University: Acton. A.C.T. ANU PRESS.
- Lee, Everett S. 1976. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
- Lewang, Patrice. 2003. *Ayo Ketanah Sabrang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- MacAndrews, Colin. Dkk. 1983. *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia: Suatu Perbandingan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mulyotopo, Suryono. 1963. *Penyebaran Pedesaan di Daerah Transmigran Seputih Banyak: Ditinjau dari Segi Geografi-Sosial Ekonomi*. Skripsi Doktorat Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.
- Panudju, Aries. 1975. *KUD dan Pembinaan Daerah Transmigrasi* (Jakarta: Program Perencanaan Nasional F.E.U.I-BAPPENAS).
- Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSM). 1980. *Pemantapan Usaha Pembangunan di Daerah Transmigrasi*. Jakarta: YKTI.
- Sitorus, M. dkk. 1996. *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya Masyarakat Lampung*. Lampung: Arian Jaya.
- Sjamsu, M. Amral. 1959. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sunarto. 1985. *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980* Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Suparlan, Parsudi. "Transmigrasi dan Transformasi Budaya", dalam Muhajir Utomo dkk, *90 tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspaswara dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, 1997.
- Sutjana, I Gusti Made. 1996. "Balinese Transmigrations in Lampung: Language Change and Tradition" dalam Adrian Vickers (ed), *Being Modern Bali: Image and Change* (Yale Southeast Asia Studies Monograph Series No.43).
- Sutrisno, Lukman. 1997. "Transmigrasi dan Perubahan Budaya: Sebuah Refleksi Sembilan Puluh Tahun Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Indonesia", dalam Muhajir Utomo dkk, *90 tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspaswara dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI.
- Swasono, Edi dan Masri Singarimbun (Ed). 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia (1905-1985)*. Jakarta: UI Pres (cetakan II).
- Wamid, Palali dan Teguh W.S. 1971. *Laporan Proyek Transmigrasi di Lampung*. Jakarta: Direktorat Jendral Transmigrasi.
- Widyatmoko, Benyamin G dan M. Irfan Affandi, "Transformasi Struktural di Wilayah Permukiman Transmigrasi Lahan Kering Terhadap Perekonomian Propinsi Lampung", dalam Muhajir Utomo

dkk, *90 tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*, (Jakarta: Puspaswara dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, 1997)